

**IMPLEMENTASI *DIGITAL INTER-CLUSTERING LINKAGE*  
AGROINDUSTRY SEBAGAI STRATEGI MENGATASI DISPARITAS  
EKONOMI REGIONAL  
(STUDI PADA AGROINDUSTRI PROVINSI JAWA TIMUR)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Agus Santoso  
155020100111023**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**IMPLEMENTASI *DIGITAL INTER-CLUSTERING LINKAGE*  
AGROINDUSTRY SEBAGAI STRATEGI MENGATASI DISPARITAS  
EKONOMI REGIONAL  
(STUDI PADA AGROINDUSTRI PROVINSI JAWA TIMUR)**

Yang disusun oleh :

Nama : Agus Santoso  
NIM : 155020100111023  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 Januari 2019

Malang, 3 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.  
NIP. 19680911 199103 2 003

**IMPLEMENTASI *DIGITAL INTER-CLUSTERING LINKAGE*  
AGROINDUSTRY SEBAGAI STRATEGI MENGATASI DISPARITAS  
EKONOMI REGIONAL  
(STUDI PADA AGROINDUSTRI PROVINSI JAWA TIMUR)**

**Agus Santoso, Asfi Manzilati**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
e-mail : agussantoso0897@gmail.com

**ABSTRAK**

*Permasalahan ekonomi regional yang masih terjadi sampai saat ini adalah mengenai disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah, salah satunya adalah di sektor pertanian. Disparitas tersebut diantaranya adalah disparitas teknologi produksi yang menyebabkan perbedaan produktivitas antar daerah. Disparitas teknologi produksi dengan perbedaan potensi akhirnya menyebabkan ketersediaan komoditas yang berbeda di setiap daerah di Jawa Timur, sehingga volatilitas harga menjadi tidak terkendali. Kemudian, disparitas yang diakibatkan disintegrasi rantai nilai produksi sehingga menghambat mobilitas barang dan jasa. Disparitas tersebut menyebabkan daya dukung sektor pertanian terhadap perekonomian daerah menjadi lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama agroindustri Jawa Timur adalah disintegrasi.. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi kluster agroindustri agar tercipta keterkaitan antar sektor guna mengatasi disparitas di Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis menggunakan alat analisis cluster, serta ditelaah menggunakan konsep Simbiose Mutualistik. Gagasan untuk mengembangkan keterkaitan antar kluster agroindustri Jawa Timur dimulai dengan pemetaan potensi yang terbagi atas tiga klasifikasi kluster, yaitu kluster pangan, hortikultura, dan perkebunan. Langkah strategis berikutnya adalah sinergitas peran dan fungsi stakeholders, yaitu pemerintah (Kementerian Pertanian, serta Dinas Koperasi dan UMKM), otoritas kebijakan moneter (Bank Indonesia), akademisi (Perguruan Tinggi), lembaga donor (IMF, WB, USAID) dan masyarakat sipil sehingga terwujud suatu institusi yang independen. Kemudian, Business Development Service (BDS) sebagai pusat informasi, sarana akses pemasaran, serta pengembangan usaha akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) guna mereduksi disparitas, menciptakan efisiensi kolektif yang berujung pada peningkatan perekonomian daerah dan membentuk kemandirian agroindustri Jawa Timur.*

*Kata Kunci: Disparitas, Agroindustri, Kluster, Ekonomi Regional*

---

**A. PENDAHULUAN**

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sektor pertanian dan agroindustri. Problematika utama Jawa Timur adalah adanya disparitas regional antar kota/kabupaten yang cukup tajam. Sektor pertanian sebagai penyedia input utama agroindustri pada gilirannya akan mampu mendorong produktivitas dari sisi dorongan input. Namun, terjadi beberapa disparitas sektor pertanian antar kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga berdampak pada produktivitas agroindustri dan inflasi kabupaten/kota. Pertama, disparitas yang disebabkan karena perbedaan penggunaan teknologi produksi. Kedua, disparitas regional terjadi saat musim panen raya yang menyebabkan *supply* di pasar regional tidak terkendali sehingga harga komoditas turun drastis. Ketiga, akibat tidak adanya integrasi regional Jawa Timur mengakibatkan instabilitas ekonomi karena volatilitas harga yang semakin tidak menentu. Dari ketiga bentuk disparitas regional tersebut dapat diambil suatu konklusi bahwa problematika utama agroindustri Jawa

Timur adalah disintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya integrasi sektoral agar tercipta keterkaitan alamiah yang memacu pertumbuhan ekonomi regional.

Dari problematika agroindustri Jawa Timur, maka dari itu perlu adanya pengembangan integrasi atau jaringan keterkaitan antar klaster agroindustri sehingga tidak terjadi penurunan harga yang drastis akibat kelebihan *supply* dan tidak terjadi inflasi karena kelangkaan. Selain itu, integrasi atau keterkaitan antar klaster agroindustri sejenis dapat memunculkan *knowledge spillover*, sehingga dapat secara simultan mendorong produktivitas klaster agroindustri lain. Fokus dan tujuan utama dalam penelitian ini adalah mewujudkan jaringan antar klaster agroindustri melalui pemetaan *inter-clustering linkage agroindustry* unggulan Provinsi Jawa Timur dan mengembangkan *Business Development Services* (BDS) sebagai upaya sinergitas stakeholders guna mewujudkan efisiensi kolektif.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### **Ekonomi Regional dan Strategi Pembangunan Daerah**

Analisa ekonomi regional pada hakekatnya membahas mengenai kegiatan perekonomian ditinjau dari segi sudut penyebaran kegiatan ekonomi ke berbagai lokasi dalam suatu *economic space* atau ruang ekonomi tertentu, misalnya dalam suatu negara atau suatu provinsi. Disamping itu, analisa ekonomi regional akan melibatkan dirinya pula dalam menganalisa ekonomi suatu daerah ditinjau secara sektoral dan secara makro. Daerah tersebut dapat berupa satu propinsi, satu kabupaten, satu daerah khusus tertentu satu kota besar yang pembangunannya akan digalakkan. Analisa mengenai perekonomian kota besar merupakan suatu cabang khusus dari analisa ekonomi regional dan dikenal sebagai analisa urban atau urban economics (Tarigan, 2007).

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi adalah menghapus atau mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Istilah pembangunan dapat diartikan sebagai peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Definisi tersebut berorientasi pada tujuan pembangunan, yakni mengupayakan pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equality*). Upaya pertumbuhan dicerminkan oleh pertumbuhan pendapatan, sedangkan upaya pemerataan direfleksikan oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah, institusi lain yang memiliki tutujuan yang sama dan masyarakat harus bersama-sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan itu. Alat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah adalah potensi sumber daya alam dan kemampuan dalam mengolahnya.

### **Pembangunan dan Ketimpangan (*disparity*) Regional**

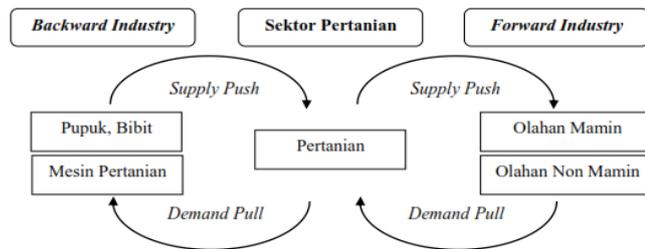
Tujuan pembangunan ekonomi regional bersifat multidimensional, yakni menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan (*disparity*), dan pengangguran (Todaro, 2000). Salah satu masalah dalam perekonomian yaitu adanya disparitas spasial. Disparitas spasial adalah salah satu ukuran hasil pembangunan yang diukur dari meningkatnya hasil pembangunan (*welfare*) dalam bentuk besaran *income* perkapita. Disparitas spasial terjadi karena adanya ketimpangan *income* perkapita antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Menurut pandangan Williamson dalam Syafrizal (2008), pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua wilayah. Pada tahap awal, proses pembangunan cenderung terkonsentrasi pada area pusat suatu negara. Penyebarannya ke wilayah pinggiran dan sektor-sektor yang relatif lemah hanya terjadi secara subsequent. Konsekuensi dari keberadaan dua bentuk kecepatan pembangunan yang berbeda tersebut adalah meluasnya jurang ketimpangan antar wilayah pada fase awal pembangunan ekonomi di suatu negara. Akan tetapi, kondisi seperti bisa berkurang ketika pendapatan nasional mencapai tingkat tertentu. Ada beberapa faktor yang menentukan ketimpangan antar wilayah, yang menurut Syafrizal (2008) adalah; 1) Perbedaan kandungan sumberdaya alam; 2) Perbedaan kondisi demografis; 3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; 4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; 5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah

### **Agroindustri Sebagai Pola *Inter-Clustering Linkage***

Pola pembangunan Indonesia menurut Kuncoro (2007) selalu berorientasi pada pembangunan yang lebih banyak memberikan perhatian pada pengembangan industri manufaktur dan relatif lebih mengabaikan peranan sektor pertanian. Hal ini linier dengan mainstream

pembangunan ekonomi yang menempatkan *efficiency driven* sebagai tahap kedua setelah *factor driven* untuk mencapai *innovation driven* (Schwab, 2012). Paham ini mengemukakan adanya transformasi ekonomi dari sektor pertanian (*factor driven*) menuju sektor industri manufaktur (*efficiency driven*), dimana adanya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri yang tangguh. Berikut adalah gambaran dari keterkaitan dalam pola kluster agroindustri.



Gambar 1. **Pola Kluster Agroindustri**  
Sumber: Diolah dari Kuncoro, 2007

*inter-clustering linkage agroindustry* dapat diartikan sebagai suatu hubungan rantai produksi yang menghubungkan setiap elemen dalam sektor pertanian untuk mencapai produktivitas.

### Pengembangan BDS di Indonesia

Pada awal mulanya, BDS mulai dicetuskan pada pertemuan tahunan di Budapest tahun 1995 oleh the Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development. Fokus BDS adalah bagi Usaha Kecil, dengan tujuan untuk mengetahui dan mendokumentasikan praktek penyediaan jasa yang terbaik. Suatu kelompok kerja BDS didirikan dan pedoman awal ditulis dan diterbitkan dalam bulan Januari 1998. Banyak lembaga berperan dan berpartisipasi aktif dalam proses ini, termasuk lembaga donor internasional seperti GTZ, ILO, USAID dan Bank Dunia.

Pada awal tahun 2000 peran BDS mulai aktif dalam melayani dan membantu UMKM di Indonesia. Tidak hanya itu, Konferensi Nasional Business Development Services tanggal 27-30 Mei 2002 telah melahirkan sebuah Asosiasi Nasional yang mewadahi peran dan kiprah BDS dalam memberdayakan UMKM. (Asosiasi BDS Indonesia, 2014). Umumnya, BDS yang berkembang di Indonesia hanya menasar pada usaha berbasis *home industry* dan bergerak di bidang industri kreatif. Belum ada BDS yang menasar industri kecil yang berbasis pertanian. Padahal, lebih dari 12 persen perekonomian Indonesia khususnya Jawa Timur ditopang oleh sektor pertanian atau agroindustri. Semestinya dengan potensi pertanian yang besar itu, memerlukan pengembangan lebih lanjut mengenai aplikasi konsep BDS di sektor pertanian, sehingga dengan implementasi BDS yang tepat pada sektor agroindustri dan didukung dengan kebijakan yang mendukung upaya implementasi tersebut, mampu memaksimalkan peran sektor pertanian bagi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan.

## C. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan spasial atau keruangan. Metode ini digunakan karena bertujuan untuk memetakan dan membuat data informasi mengenai potensi agroindustri di tiap wilayah di Jawa Timur, kemudian membuat atau merumuskan suatu strategi kebijakan untuk mengembangkan konsep *inter-clustering linkage agroindustry*.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Adapun waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2018 sampai selesai. Sedangkan, Periode data penelitian yang diambil dari sumber pustaka adalah selama kurun waktu lima tahun, yakni dari tahun 2013-2017

### Pengukuran Variabel

Perhitungan variabel yang digunakan adalah dengan cara menghitung seberapa besar kontribusi kluster agroindustri kabupaten/kota terhadap agroindustri Jawa Timur. Berikut adalah cara perhitungan data tersebut (Todaro, 2000).

$$\text{Kontribusi} = \frac{xbyi}{Xb} \times 100$$

Keterangan :

$xbyi$  = PDRB pertanian kluster agroindustri b kabupaten/kota i

$X$  = PDRB pertanian kluster agroindustri b Jawa Timur

### Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kluster agroindustri Jawa Timur secara menyeluruh. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kluster agroindustri kabupaten/kota di Jawa Timur

### Data dan Sumber Data

Adapun data kuantitatif (skunder) yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB sektor pertanian Jawa Timur dan PDRB sektor pertanian kabupaten/kota Jawa Timur yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur, buku, laporan, jurnal, dan sumber pustaka lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep *Simbiose Mutualistik*, dimana masing-masing pelaku ekonomi akan melakukan hubungan, interaksi, dan menjalin sinergitas dalam menentukan suatu kebijakan yang bersifat mutual atau memiliki dampak baik tidak hanya bagi subjek kebijakan, akan tetapi juga berdampak baik ke objek sekitarnya. Sedangkan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *cluster*.

## D. PEMETAAN AGROINDUSTRI UNGGULAN JAWA TIMUR

### Pemetaan Kluster Agroindustri Pangan Unggulan Jawa Timur

Secara spesifik agroindustri pangan, menurut Kementerian Pertanian tahun 2009 dalam Miradani (2010), menempatkan Jawa Timur sebagai supplier terbesar komoditas pangan terutama beras untuk Indonesia belahan timur selain Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional khususnya komoditas padi merupakan potensi regional yang berpeluang untuk dikembangkan. Tidak hanya itu, komoditas pangan Jawa Timur juga memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pangan nasional. Berikut adalah gambaran pemetaan potensi agroindustri pangan Jawa Timur.



Gambar 2. Pemetaan Kluster Pangan Unggulan Jawa Timur

Sumber : Ilustrasi Penulis

### Pemetaan Kluster Agroindustri Hortikultura Unggulan Jawa Timur

Kemerataan akan kesuburan tanah, spesialisasi komoditas hortikultura daerah, serta iklim tropis menjadi faktor pendukung berkembangnya komoditas hortikultura dengan sangat baik di

Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2018) kontribusi hortikultura Jawa Timur terhadap nasional cukup besar terutama untuk komoditas buah dan sayuran. Berikut adalah pemetaan sentra hortikultura Jawa Timur.

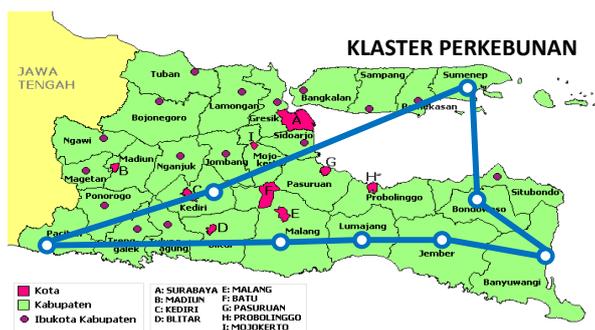


Gambar 3. Pemetaan Klaster Hortikultura Unggulan Jawa Timur

Sumber : Ilustrasi Penulis

### Pemetaan Klaster Agroindustri Perkebunan Unggulan Jawa Timur

Secara konsisten selama 5 tahun dari tahun 2013-2017 kontribusi perkebunan Jawa Timur terhadap nasional terjaga di angka lebih dari 8 persen. Komoditas perkebunan unggulan Jawa Timur yang paling menonjol adalah komoditas tebu. Meskipun terdapat komoditas unggul lainnya seperti, kopi, tembakau dan kelapa, tebu adalah komoditas yang paling unggul dengan kontribusi terhadap nasional secara konsisten sebesar lebih dari 48 persen.



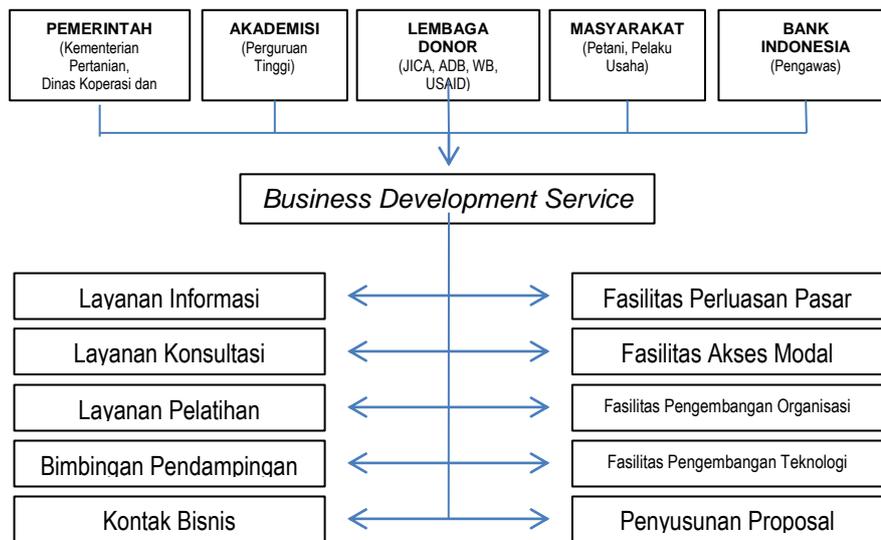
Gambar 4. Pemetaan Klaster Perkebunan Unggulan Jawa Timur

Sumber : Ilustrasi Penulis

## E. REVITALISASI *BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES* (BDS) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN EFISIENSI KOLEKTIF

### *Sinergitas Stakeholders Melalui Business Development Services (BDS) dalam Membangun Inter-Clustering Linkage Berbasis Digital*

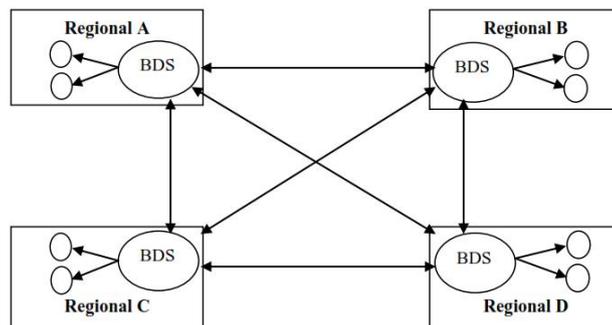
Sebagai upaya mencapai kemandirian sektoral *inter-clustering linkage*, peran pemerintah dalam mencapai keterkaitan antar kluster perlu dikendalikan agar tidak terjadi ketergantungan sektoral. Pemerintah perlu memberikan intervensi dan insentif secara proporsional agar efektifitas dan efisiensi dapat tercapai dengan kemandirian. Maka dari itu, perlu adanya stakeholders swadaya yang secara independen berfungsi mengembangkan agroindustri. *Business Development Services* (BDS) merupakan salah satu institusi trans-regional bahkan trans-nasional yang berfokus pada pengembangan industri kerakyatan skala kecil (Tekle, 2009). Konstruksi BDS yang ideal adalah ketika terjadi sinergitas antara berbagai stakeholders. Hal ini diupayakan mengingat kompleksitas tujuan yang diharapkan dari BDS perlu di *counter* oleh berbagai disiplin ilmu dan peran masing-masing *stakeholders* terkait. Peran BDS menurut Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development (2001) adalah sebagai berikut.



Gambar 5. 10 Kinerja Sinergitas Stakeholders melalui BDS

Sumber: Ilustrasi Penulis

BDS akan dibentuk di setiap regional yaitu kota/kabupaten untuk memberikan fokus layanan kepada kluster agroindustri unggulan di regional tersebut. Dalam fungsi dan peranannya guna mendorong produktivitas industri kecil, BDS dapat menyediakan layanan maupun offline, sehingga dapat mendorong interaksi antar BDS dalam satu regional.



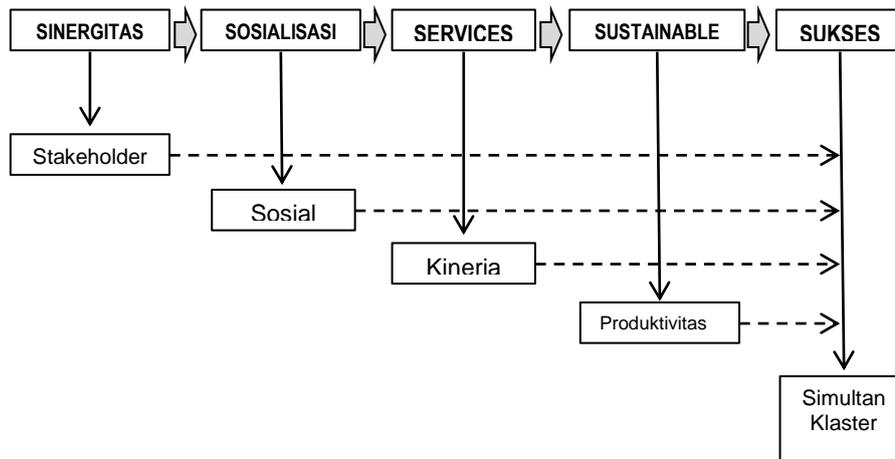
Gambar 6. 10 Kinerja Sinergitas Stakeholders melalui BDS

Sumber: Ilustrasi Penulis

### Rancang Bangun Kinerja *Inter-Clustering Linkage* dalam Mewujudkan Efisiensi Kolektif

Menurut Hoetoro (2012), kaitan antar kluster (*inter-clustering linkage*) industri akan menciptakan daya vital setiap kluster menjadi lebih dinamis. Pada kondisi seperti ini dinamika di internal kluster (antar usaha) dan di eksternal kluster (antar kluster) akan saling terhubung dalam jalinan kerjasama usaha. Kerjasama inilah yang akan menciptakan efisiensi kolektif namun juga tetap mempertahankan persaingan untuk mencapai efisiensi dan pertumbuhan produksi.

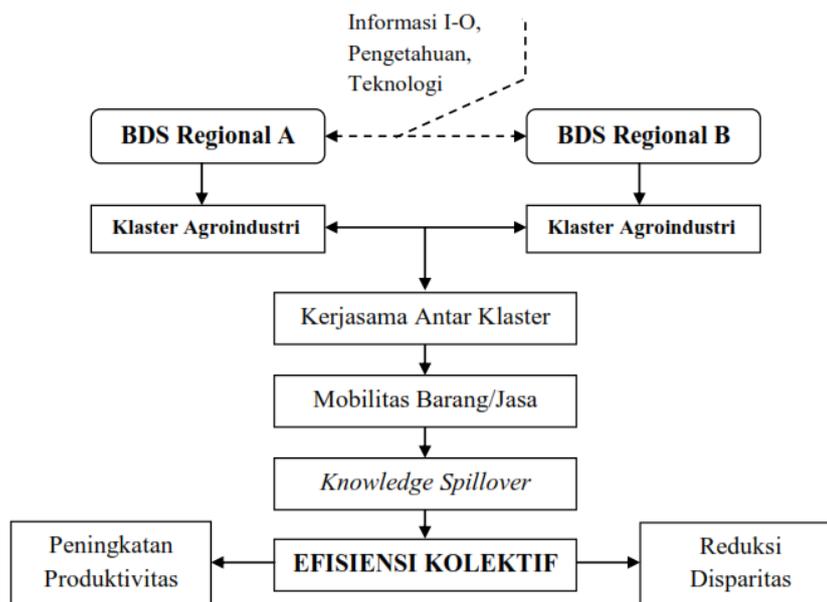
Efisiensi kolektif yang diterima oleh tiap usaha di masing-masing kluster adalah keunggulan dan keuntungan yang dirasakan akibat interaksi antara ekonomi internal dan eksternal. Misalnya, interaksi yang terjalin antar usaha dalam kluster tertentu akan meningkatkan *knowledge spillover*, yakni perputaran arus informasi, teknologi dan pasar, sehingga meningkatkan efisiensi di tiap usaha. Sedangkan interaksi yang terjalin antar kluster akan meningkatkan informasi input-output dan memperluas jaringan pasar. Dengan ini, usaha-usaha yang tergabung dalam kluster akan mampu memaksimalkan produksi dan dengan kerjasama antar kluster, maka akan terwujud pemerataan pertumbuhan di setiap regional. Berikut adalah tahapan yang dilakukan BDS dalam meningkatkan agroindustri di Jawa Timur.



Gambar 7. Tahap-Tahap Layanan BDS Terhadap *Inter-Clustering Linkage*

Sumber : Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, 2001 (diolah)

Linier dengan penjelasan Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development (2001), bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran BDS setelah tahap sinergitas perlu dilakukan sosialisasi sehingga seluruh kluster industri memiliki akses terhadap layanan digital. Menurut salah satu unit dari World Bank Group, yakni Small Medium Enterprise Departement mengatakan bahwa sosialisasi perlu dilakukan karena industri kecil selalu terkendala dengan pengetahuan, kecakapan, dan wawasan sumberdaya manusia yang rendah sehingga sosialisasi perlu dilakukan terutama untuk BDS yang baru dibentuk atau direvitalisasi untuk melayani kluster industri kecil. Maka dari itu, kinerja inter- clustering linkage yang mandiri adalah sebagai berikut ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 8. Rancang Bangun Kinerja *Inter-Clustering Linkage* dalam Menciptakan Efisiensi Kolektif

Sumber : Ilustrasi Penulis

Interaksi yang semakin intens dan kuat akan membangun jaringan, persebaran teknologi produksi yang merata dan *knowledge spillovers* yang menurut Capello dan Nijkamp (2009) bahwa interaksi antar kluster industri akan mendorong dinamika antar kluster terkait mengalami pertumbuhan input-output dan distribusi teknologi produksi yang semakin baik. *Knowledge spillovers* dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu persaingan dan kerjasama. Pola perkembangan knowledge spillover memiliki corak yang berbeda antar keduanya, namun tetap dalam satu tujuan yang sama yaitu mengembangkan dan mendistribusikan teknologi dan inovasi produksi.

## F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Implementasi *Inter-Clustering Linkage Agroindustry* Jawa Timur. Pertama, dimulai dengan pemetaan sentra agroindustri Jawa Timur, kemudian masuk kepada langkah strategis untuk mengimplementasikan inter-clustering linkage melalui sinergitas peran dan fungsi stakeholders, sehingga terwujud suatu institusi independen, yakni *Business Development Service* (BDS). BDS akan memberikan informasi kepada kluster di regional terkait informasi kondisi input-output, pengetahuan dan teknologi produksi. Inter-clustering linkage yang terjadi dapat mendorong kluster sejenis saling bekerjasama baik dalam hal efisiensi input, produksi, maupun output untuk meningkatkan kapasitas produksi. Mobilisasi barang dan jasa dengan volume yang semakin besar dengan menjamin setiap output yang dihasilkan tidak berlebih namun juga tidak langka karena adanya *inter-clustering linkage*. Dengan demikian, akan tercapai efisiensi kolektif yang meningkatkan produktivitas dan mereduksi disparitas.

### Rekomendasi Kebijakan

Dari studi yang dilakukan, maka penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi beberapa pihak atau stakeholder untuk berbagai kepentingan dan dapat dirumuskan suatu rekomendasi kebijakan sebagai berikut.

Tabel 1. Rekomendasi Kebijakan Stakeholders

STAKEHOLDER	KEBIJAKAN YANG BISA DILAKUKAN
Pemerintah (Kementerian Pertanian, Bappeda)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi peralihan atau perpindahan komoditas tanam yang tidak terkendali akibat dorongan harga melalui Peraturan Daerah .</li> <li>2. Membuat <i>mapping</i> lahan, sehingga produksi bisa terkontrol dan terhindar dari volatilitas harga yang tidak terkendali.</li> </ol>
Otoritas Kebijakan Moneter (Bank Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi perkembangan klasterisasi dan pendampingan BDS tiap daerah.</li> <li>2. Memastikan stabilitas harga agar inflasi tetap stabil..</li> </ol>
Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan konsep manajemen BDS yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi kerakyatan.</li> <li>2. Membentuk kelembagaan masyarakat yang <i>prudent</i> dalam mengelola, mengawasi, dan <i>monitoring</i> BDS.</li> </ol>

Sumber : Ilustrasi Penulis

## DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri Baru 2030?*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Schwab, Klaus. 2012. *The Global Competitiveness Report 2011–2012: World Economic Forum*. [www.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017\\_FINAL.pdf](http://www.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf)

- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Miradani, Sukma Dini. 2010. Analisis Perencanaan Pembangunan Agroindustri Provinsi Jawa Timur: Pendekatan Sektoral dan Regional. Tesis. Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Bogor: Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2018. Jawa Timur Dalam Angka 2018. <https://jatim.bps.go.id/publication/2018/08/16/9999b727d316c006ee2fd7e7/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2018> diakses pada 20 September 2018
- Tekle, Hibert Nigussie. 2009. *Impact of Business Development Services in Local Economic Development: The Case of Gullele Handloom MSE in City Place*. Netherland: Institute of Social Studies
- Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development. 2001. *Business Development Services untuk Usaha Kecil: Pedoman Prinsip-prinsip untuk Intervensi Lembaga Donor*. <https://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/BDS-Guiding-Principles-2001-Indonesian.pdf>
- Hoetoro, A. 2012. *Analisis Tingkat Kerjasama dan Persaingan antar Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Industri Kecil di Jawa Tengah*. <http://feb.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/09/2.b.-Analisis-tingkat-kerjasama.....pdf>.
- Capello, Roberta dan Peter Nijkamp. 2009. *Handbook of Regional Growth and Development Theories*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited